

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kerangka ekonomi dan keuangan menggambarkan secara umum kondisi dan analisis statistik serta karakteristik perekonomian dan keuangan Kabupaten Bantul tahun 2019 dan perkiraan tahun 2020, serta prospek perekonomian tahun 2021. Didalam bab ini dibahas mengenai tantangan perekonomian Kabupaten Bantul di masa pandemi, pasca pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19) dan prediksinya yang dapat memengaruhi kinerja perekonomian daerah, serta kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 dan diselaraskan dengan RKP 2021 dan RKPD DIY tahun 2021. Penyelarasan juga disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Implementasi arah kebijakan ekonomi daerah menjadi dasar kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan lebih lanjut kedalam program dan kegiatan.

3.1.1 Kondisi dan Arah Perekonomian Nasional

Pada awal tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 berdampak pada perekonomian nasional yaitu terganggunya mobilitas masyarakat, terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa serta terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan

pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan tumbuh sangat lambat, bahkan bisa terjadi kontraksi jika pandemi Covid-19 berlangsung lebih lama.

Pada Tahun 2021 diasumsikan pandemi covid-19 telah berakhir. Arah kebijakan pembangunan nasional sesuai dengan tema dalam RKP 2021 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang merupakan upaya untuk mengejar target RPJMN 2020-2024. Fokus pembangunan diarahkan pada pemulihan industri, pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana. Adapun sasaran dan target yang harus dicapai, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5 – 5,5%
2. Tingkat inflasi berkisar 3,0%
3. Tingkat kemiskinan 9,2 – 9,7%
4. IPM 72,78 – 72,90
5. Gini ratio 0,377 – 0,379
6. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 7,5 – 8,2%

Untuk mencapai target sasaran tersebut, arah kebijakan nasional di bidang ekonomi adalah melakukan transformasi ekonomi, dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi, Dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, agenda pembangunan nasional yang berkaitan dengan perekonomian antara lain:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan inovasi dan kualitas investasi sebagai modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter

3. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Hal ini dapat dilakukan melalui Perkuatan infrastruktur untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Dalam rangka pemulihan ekonomi, didorong untuk mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja dan menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait. Fokus pembangunan diarahkan pada pemulihan industri, pariwisata dan investasi sebagai berikut:

1. Industri

Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi melalui pembangunan dan pengelolaan usaha industri yang dilakukan secara optimal dan efisien.

2. Pariwisata

Mengembangkan destinasi, perluasan pemasaran, penguatan industri dan kelembagaan pariwisata.

3. Investasi

Meningkatkan inovasi dan kemudahan investasi.

3.1.2. Kondisi dan Arahan Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta

Adanya Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran untuk tahun 2020 yang telah ditetapkan dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022, sehingga Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian antara lain:

1. Target LPE Provinsi DIY diperkirakan sebesar 5,29%. Penyesuaian target dampak pandemi Covid-19 pada skenario pesimis sebesar 0,5%, moderat 2,3% dan optimis 3,1%.

2. Target TPT Provinsi DIY diperkirakan sebesar 2,42%. Penyesuaian target pada skenario pesimis sebesar 8,93%, moderat 7,43% dan optimis 6,98%.
3. Sasaran tingkat kemiskinan sebesar 9,11%. Penyesuaian target dampak Covid – 19, tahun 2020 pada skenario pesimis sebesar 13,37% (jumlah penduduk miskin 519.048 jiwa), moderat 12,71% (jumlah penduduk miskin 493.561 jiwa), dan optimis 12,42% (jumlah penduduk miskin 482.233 jiwa).

Tahun 2021 aktivitas perekonomian yang berkelanjutan difokuskan pada pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang diarahkan pada sektor terdampak Covid-19, meliputi : Pariwisata, Tenaga Kerja, Investasi, Industri, Sosial, dan Kesehatan, dengan asumsi: 1) Pandemi Covid-19 selesai tahun 2020; 2) Proyek infrastruktur pusat tetap ada di tahun 2021; dan 3) Pemulihan kondisi sosial ekonomi dilakukan tahun 2021.

Dampak pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap perekonomian di DIY, sehingga dilakukan penyesuaian target makro ekonomi sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi berkisar 4,2 - 6,0%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berkisar 4,8 – 3,69%
3. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 11,6 – 11,47%

3.1.3. Kondisi Ekonomi Kabupaten Bantul

Identifikasi kondisi pembangunan mencakup pencapaian indikator makro ekonomi, pencapaian indikator pembangunan daerah, termasuk analisis dan proyeksi kapasitas fiskal daerah sebagai sumber dana bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemerintah.

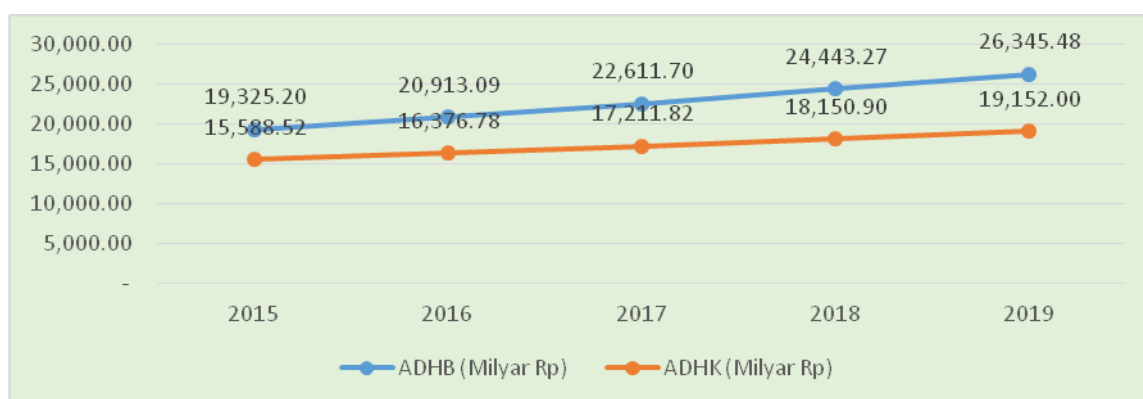
Kerangka ekonomi makro tahun 2021 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Bantul pada tahun 2019 dan penyesuaian dampak Pandemi Covid-19 pada tahun 2020, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang untuk mewujudkan Bantul yang sehat, cerdas dan sejahtera. Kerangka ekonomi makro meliputi pertumbuhan

ekonomi, struktur ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan, distribusi pendapatan serta arah kebijakan keuangan daerah.

Secara umum kondisi ekonomi Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh indikator ekonomi makro nasional dan DIY. Kemajuan ekonomi Kabupaten Bantul dapat diketahui dengan menyandingkan data perekonomian Kabupaten Bantul dengan DIY dan nasional.

3.1.3.1. Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kemajuan pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan suatu proses yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk, serta diikuti oleh perbaikan sistem kelembagaan di suatu daerah. Dari nilai PDRB tersebut dapat diturunkan indikator penting yaitu struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, dan inflasi. Oleh karena itu PDRB dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap kebijaksanaan pembangunan daerah khususnya pembangunan ekonomi guna penyusunan atau menggariskan kebijakan lebih lanjut.



Sumber: BPS, diolah 2020

Gambar 3.1 Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Peningkatan ini terjadi pada

PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku (PDRB nominal) maupun dengan menggunakan perhitungan harga konstan (PDRB riil).

Mencermati gambar di atas, tampak peningkatan yang signifikan dengan rata-rata 1.755,1 miliar rupiah per tahun untuk PDRB atas dasar harga berlaku, dan rata-rata peningkatan sebesar 890,9 miliar untuk PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010. Pola pada grafik tersebut tidak jauh berbeda peningkatannya antara PDRB yang menggunakan perhitungan atas dasar harga berlaku, dengan PDRB yang dihitung menggunakan harga konstan.

Peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku pada periode antara tahun 2018-2019 telah mencapai 1.902,2 miliar rupiah. Pencapaian PDRB tahun 2019 ini merupakan PDRB yang tertinggi selama lima tahun terakhir, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.1 Perkembangan PDRB dan Kontribusi PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No.	Lapangan Usaha	PDRB	2015 (%)	PDRB	2016 (%)	PDRB	2017 (%)	PDRB	2018* (%)	PDRB	2019** (%)
		(milyar Rp)		(milyar Rp)		(milyar Rp)		(milyar Rp)		(milyar Rp)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.821.403	14,6	2.995,87	14,33	3.131,89	13,85	3.331,34	13,63	3.442,61	13,07
B	Pertambangan dan Penggalan	125,53	0,65	128,52	0,61	129,08	0,57	133,02	0,54	135,24	0,51
C	Industri Pengolahan	2.909.864	15,06	3.180,27	15,21	3.449,02	15,25	3.721,10	15,22	3.999,98	15,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21,882	0,11	26,44	0,13	32,3	0,14	35,2	0,14	37,93	0,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,193	0,08	17,04	0,08	17,98	0,08	19,08	0,08	20,72	0,08
F	Konstruksi	1.803.228	9,33	1.943,46	9,29	2.121,98	9,38	2.374,86	9,72	2.569,86	9,75
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1.585.613	8,2	1.771,63	8,47	1.945,84	8,61	2.123,78	8,69	2.277,89	8,65
H	Transportasi dan Pergudangan	940,531	4,87	1.001,48	4,79	1.070,71	4,74	1.153,28	4,72	1.278,99	4,85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.239.276	11,59	2.439,52	11,67	2.652,69	11,73	2.856,63	11,69	3.140,31	11,92
J	Informasi dan Komunikasi	1.411.574	7,3	1.530,26	7,32	1.668,38	7,38	1.789,60	7,32	1.915,28	7,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	545,349	2,82	585,22	2,8	626,18	2,77	692,77	2,83	775,32	2,94
L	Real Estat	1.262.118	6,53	1.376,06	6,58	1.486,18	6,57	1.604,53	6,56	1.767,42	6,71
M,N	Jasa Perusahaan	94,902	0,49	100,78	0,48	107,58	0,48	116,05	0,47	128,33	0,49

No.	Lapangan Usaha	PDRB	2015 (%)	PDRB	2016 (%)	PDRB	2017 (%)	PDRB	2018* (%)	PDRB	2019** (%)
		(milyar Rp)		(milyar Rp)		(milyar Rp)		(milyar Rp)		(milyar Rp)	
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.432.619	7,41	1.578,24	7,55	1.756,87	7,77	1.888,56	7,73	2.010,64	7,63
P	Jasa Pendidikan	1.372.466	7,1	1.437,13	6,87	1.541,56	6,82	1.661,76	6,8	1.816,96	6,9
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	354,915	1,84	387,7	1,85	419,29	1,85	443,27	1,81	488,35	1,85
R,S, T,U	Jasa lainnya	387,74	2,01	413,48	1,98	454,17	2,01	498,44	2,04	539,65	2,05
	PDRB	19.325.203	100	20.913,09	100	22.611,71	100	24.443,27	100	26.345,48	100

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2020

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Catatan: Untuk melihat struktur ekonomi pembentuk PDRB (melihat kategori yang dominan dalam pembentukan perekonomian) adalah kontribusi PDRB ADHB.

Pada Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Bantul pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 belum mengalami perubahan dan masih didominasi oleh lima lapangan usaha, yaitu: industri pengolahan; pertanian; penyediaan akomodasi dan makan minum; konstruksi; dan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor.

Dalam jangka waktu lima tahun terakhir kontribusi sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Bantul menunjukkan *trend* menurun.

Prediksi kontribusi PDRB menurut lapangan usaha di Kabupaten Bantul tahun 2020-2021 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Prediksi Kontribusi PDRB menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2021

No.	Lapangan Usaha	PDRB	2020 (%)	PDRB	2021 (%)
		(milyar Rp)		(milyar Rp)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.965,488	10,27	1,913,116	9,58
B	Pertambangan dan Penggalian	94,114	0,49	91,806	0,46
C	Industri Pengolahan	2.853,512	14,92	2.992,438	14,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	32,741	0,17	34,282	0,17
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,978	0,09	18,952	0,09
F	Konstruksi	1.598,727	8,36	1.597,947	8,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1.630,349	8,52	1.692,052	8,47
H	Transportasi dan Pergudangan	918,393	4,80	956,755	4,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.174,293	11,37	2.325,487	11,64
J	Informasi dan Komunikasi	2.250,270	11,76	2.455,898	12,29
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	616,659	3,22	687,003	3,44
L	Real Estat	1.415,287	7,40	1.506,741	7,54
M,N	Jasa Perusahaan	103,559	0,54	108,315	0,54
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.125,000	5,88	1.124,634	5,63
P	Jasa Pendidikan	1.495,839	7,82	1.587,313	7,95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	412,716	2,16	443,081	2,22
R,S,T,U	Jasa lainnya	426,361	2,23	441,812	2,21
	PDRB	19.130,287	100,00	19.977,632	100,00

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, diolah, 2020

Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diprediksikan tumbuh melambat karena beberapa lapangan usaha mengalami kendala produksi, Pada tahun 2021 perekonomian diharapkan mengalami pertumbuhan yang lebih baik karena pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian pada sektor yang mempunyai daya ungkit besar, melibatkan banyak tenaga kerja dan mempunyai potensi pendapatan daerah.

Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015-2019 dan Prediksi Tahun 2020-2021 di Kabupaten Bantul

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**	Prediksi	
							2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,12	1,52	2,5	2	0,13	-5,31	-2,66
B	Pertambangan dan Penggalan	0,61	0,35	0,06	1,57	-0,27	-9,66	-2,45
C	Industri Pengolahan	2,67	5,43	6,39	5,52	5,38	0,18	4,87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,08	15,58	3,99	4,85	4,73	2,32	4,71
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,95	2,96	3,18	5,16	8,25	7,81	11,63
F	Konstruksi	4,05	4,07	5,93	7,24	5,17	14,64	-0,05
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,77	6,54	5,79	5,64	5,19	-1,06	3,78
H	Transportasi dan Pergudangan	3,8	4,23	3,88	5,51	6,46	-2,88	4,18
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,89	6,19	5,7	6,75	8,68	1,39	6,95
J	Informasi dan Komunikasi	5,65	8,41	5,87	6,18	7,29	12,02	9,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,55	4,65	2,82	6,59	9,97	16,83	11,41
L	Real Estate	6,87	5,82	4,97	5,41	6,43	7,36	6,46
M,N	Jasa Perusahaan	7,06	4,26	4,27	5,37	7,38	-3,45	4,59

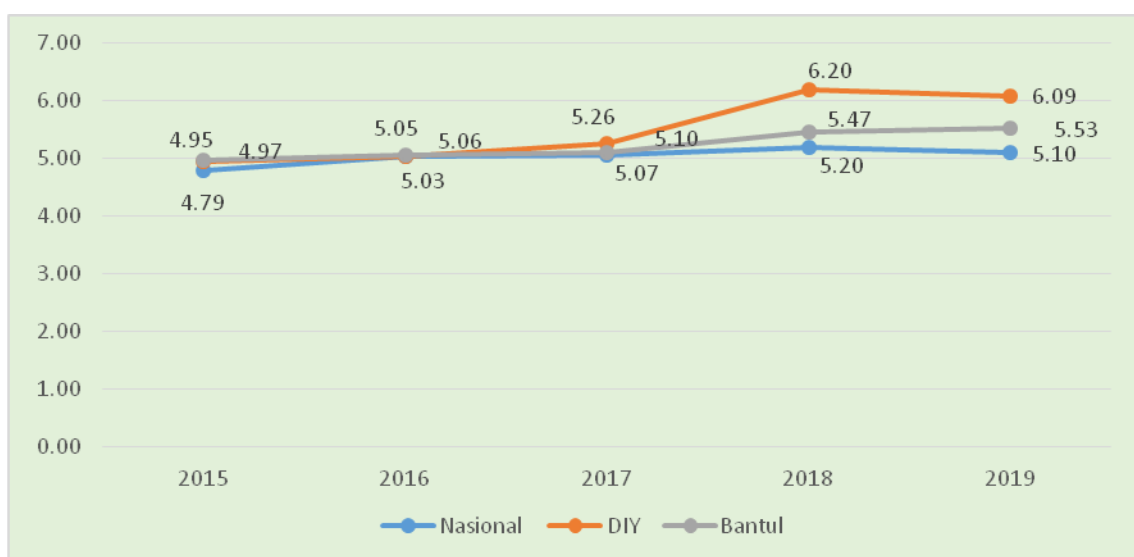
Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**	Prediksi	
							2020	2021
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,26	5,84	4,98	4,55	3,42	11,92	-0,03
P	Jasa Pendidikan	7,8	2,95	5,16	6,08	6,65	5,52	6,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,51	5,2	5,13	4,62	7,02	10,06	7,36
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,41	6,02	5,61	7,14	6,09	-2,19	3,62
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4,97	5,05	5,1	5,47	5,53	-0,13	4,43

Sumber: BPS Kabupaen Bantul, 2020

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul pada lima tahun terakhir terus meningkat. Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2019 sebesar 5,53% meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 5,47%, meskipun masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 6,09%, namun sudah diatas nasional sebesar 5,10%. Pergerakan laju pertumbuhan ekonomi Nasional, DIY dan Kabupaten Bantul dapat dicermati pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2020

Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bantul Tahun 2015 – 2019

Berdasarkan data laju pertumbuhan dan kontribusi tiap lapangan usaha PDRB Kabupaten Bantul serta dengan membandingkan data laju pertumbuhan dan kontribusi tiap lapangan usaha PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2018-2019 sebagaimana Tabel 2.16 maka dilakukan analisis Tipologi Klassen untuk klasifikasi produktivitas sektor ekonomi sebagai berikut:

Tabel 3.4 Analisis Tipologi Klassen

		Kontribusi sektor i di kabupaten lebih besar dari kontribusi provinsi	Kontribusi sektor i di kabupaten lebih kecil dari kontribusi provinsi
		$y_{ik} > y_i$	$y_{ik} < y_i$
Laju pertumbuhan sektor i di kabupaten lebih besar dari kontribusi provinsi	$r_{ik} > r_i$	Sektor Maju dan Tumbuh Cepat	Sektor Berkembang Cepat
		1. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2. Industri Pengolahan 3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor 5. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	--
Laju pertumbuhan sektor i di kabupaten lebih kecil dari kontribusi provinsi	$r_{ik} < r_i$	Sektor Maju dan Tertekan	Sektor Tertinggal
		1. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2. Jasa Keuangan 3. Jasa lainnya 4. Jasa Pendidikan 5. Jasa Perusahaan 6. Pengadaan Listrik dan Gas 7. Real Estat 8. Transportasi dan Pergudangan	1. Informasi dan Komunikasi 2. Konstruksi 3. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 4. Pertambangan dan Penggalian

Sumber: Analisis Tipologi Klassen Kabupaten Bantul, 2020

Analisis Tipologi Klassen dapat dilakukan untuk menilai potensi kinerja sektor dalam PDRB (Muta'ali, 2015). Sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul diketahui berasal dari sektor primer, sekunder, dan tersier. Sektor tersier dan sekunder yang potensial (maju dan tumbuh cepat) dapat digunakan untuk mendorong pengembangan pariwisata di Kabupaten Bantul. Sedangkan potensi dari sektor pertanian dimana sub sektor pertanian memiliki kontribusi yang

tinggi di dalam sektor tersebut, dapat dijadikan dasar untuk mempertahankan luas lahan pertanian dan menguatkan ketahanan pangan di Kabupaten Bantul.

Sebagian besar sektor tersier diketahui masih masuk ke dalam kategori sektor maju tetapi tertekan, yaitu memiliki laju pertumbuhan sektor yang baik tetapi kurang memiliki kontribusi yang cukup baik. Sektor-sektor tersebut, terutama sektor Jasa Pendidikan dan sektor Real Estat yang memiliki laju pertumbuhan dan distribusi cukup baik perlu untuk didorong perkembangannya agar dapat menjadi sektor yang juga mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul, dengan memperhatikan lahan-lahan produktif.

Sektor yang masuk dalam kategori tertinggal juga potensial untuk dikembangkan, yaitu sektor Informasi dan Komunikasi, dan sektor Konstruksi yang memiliki laju sekitar 7-8% dan kontribusi 7-9%. Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen tersebut dapat diasumsikan bahwa perputaran modal pada dua sektor tersebut cukup baik di tingkat Kabupaten Bantul, namun kurang kompetitif di tingkat DIY. Perlu upaya untuk dapat meningkatkan daya tarik dan daya saing Informasi dan Komunikasi dan sektor Konstruksi sehingga distribusi modal pada dua sektor tersebut dapat ditingkatkan dan bersaing dengan daerah lain.

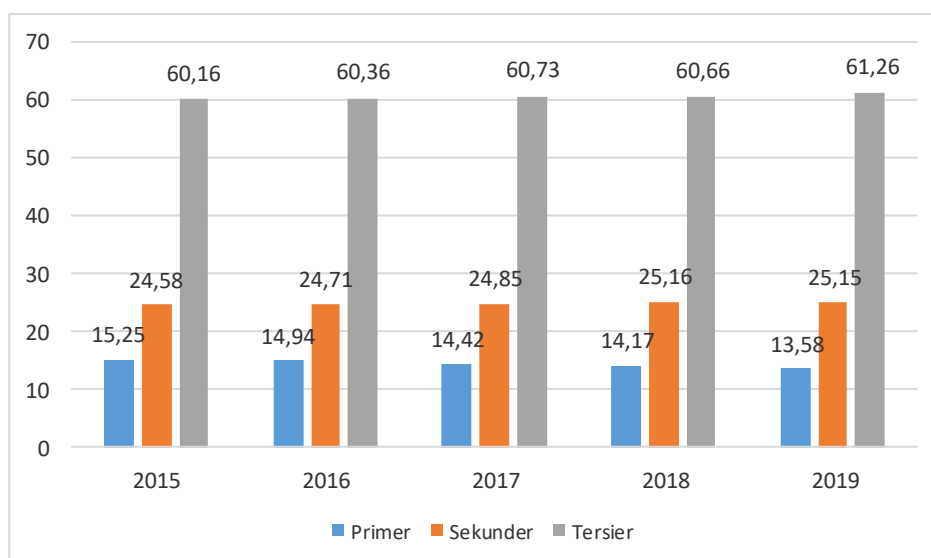
3.1.3.2. Struktur Ekonomi

Pembangunan perekonomian di Kabupaten Bantul Tahun 2019 menunjukkan perkembangan yang positif khususnya pada sektor tersier sebagai sektor yang memiliki peran terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Bantul. Kondisi perekonomian Kabupaten Bantul pada tahun 2019 dari sisi transformasi struktural yaitu pergeseran struktur ekonomi yang ditandai dengan pergeseran peranan lapangan usaha pada tiga sektor, tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Ketiga sektor tersebut adalah :

1. Sektor primer yang terdiri dari lapangan usaha (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan (2) Pertambangan dan Penggalian.

2. Sektor sekunder yang terdiri dari lapangan usaha (1) Industri Pengolahan; (2) Pengadaan Listrik dan Gas; (3) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan (4) Konstruksi.
3. Sektor tersier yang terdiri dari lapangan usaha (1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; (2) Transportasi dan Pergudangan; (3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (4) Informasi dan Komunikasi; (5) Jasa Keuangan; (6) Real Estate; (7) Jasa Perusahaan; (8) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (9) Jasa Pendidikan ; (10) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan (11) Jasa lainnya.

Peranan sektor primer pada tahun 2015 s.d. 2019 menunjukkan pertumbuhan melambat yang didominasi oleh penurunan kontribusi dari sektor pertanian, digantikan oleh meningkatnya sektor sekunder dan tersier yang memiliki peran terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Bantul, sebagaimana gambar berikut :



Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2020

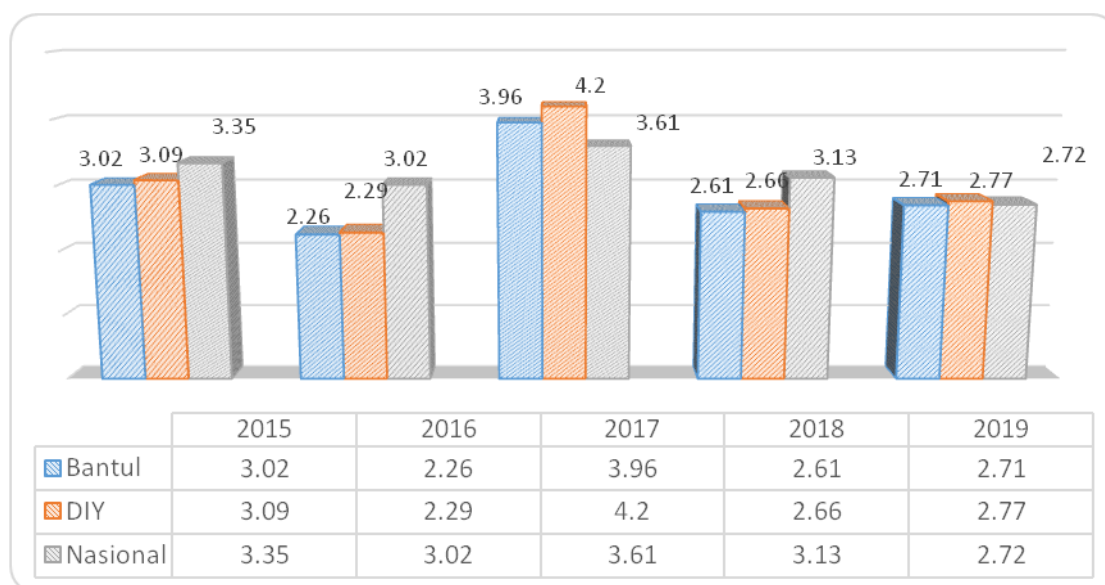
Gambar 3.3 Struktur Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2015 – 2019

3.1.3.3. Inflasi

Inflasi menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan

daya beli masyarakat. Inflasi mencerminkan kondisi stabilitas ekonomi suatu daerah.

Laju inflasi Kabupaten Bantul mengalami sedikit kenaikan dari 2,61 persen pada tahun 2018 menjadi 2,71 persen pada tahun 2019. Angka tersebut relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan laju inflasi DIY yaitu 2,77 persen dan laju inflasi nasional yaitu sebesar 2,72 persen.



Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2020

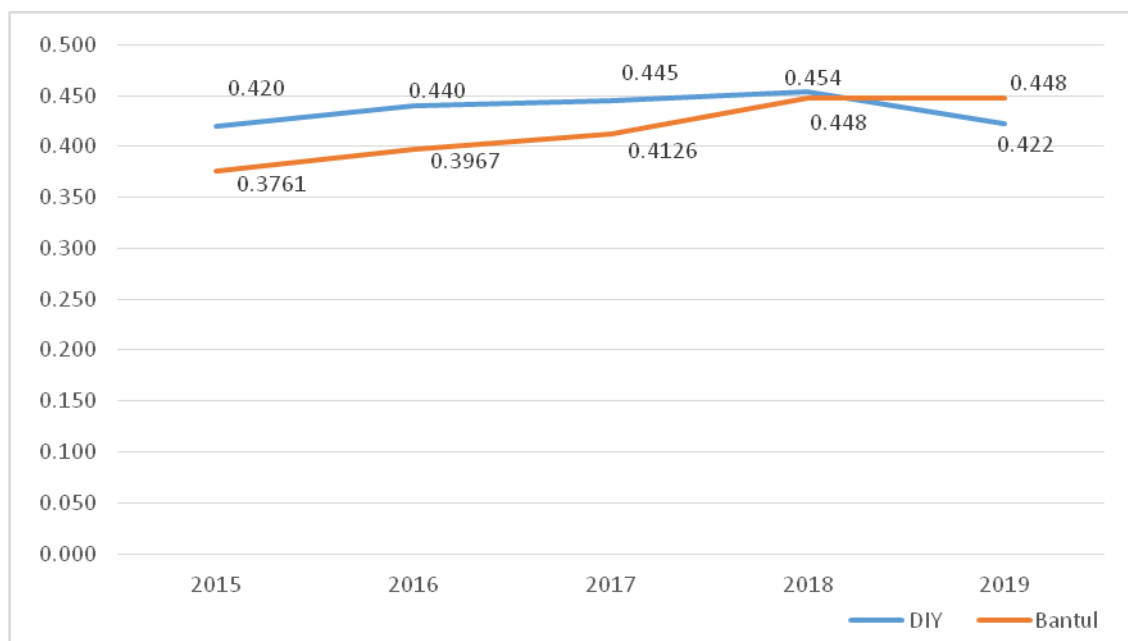
Gambar 3.4 Perkembangan Laju Inflasi
Kabupaten Bantul, DIY, dan Nasional Tahun 2015 - 2019

Keberhasilan ini dipengaruhi oleh strategi efektif yang dilakukan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bantul melalui: (1.) Upaya menjaga keterjangkauan harga; (2.) Menjaga ketersediaan pasokan bahan kebutuhan pokok, cadangan pangan pemerintah daerah dan kelembagaan; (3.) Mendorong kelancaran distribusi perdagangan antar daerah dan meningkatkan infrastruktur perdagangan; serta (4.) Melakukan komunikasi efektif dengan perbaikan kualitas dan validitas data.

3.1.3.4. Distribusi Pendapatan

Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Tingkat ketimpangan

pendapatan dapat dilihat melalui koefisien gini yang berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin timpang. Gambaran Perkembangan Koefisien Gini Kabupaten Bantul tahun 2015 - 2019 dibandingkan dengan Provinsi DIY disajikan pada grafik berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2020

Gambar 3.5 Distribusi Pendapatan Kabupaten Bantul Tahun 2015 - 2019

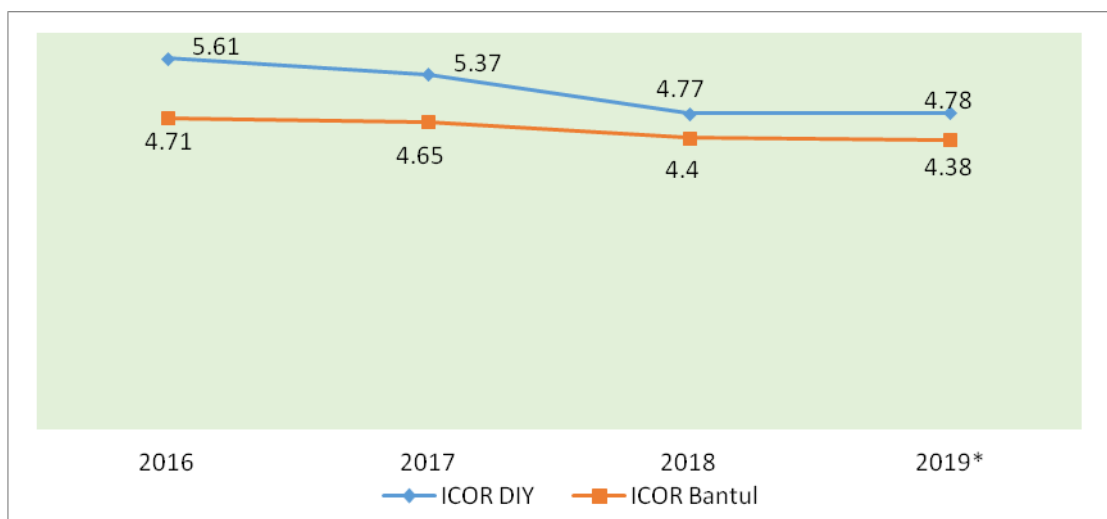
Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS Kabupaten Bantul, Koefisien Gini Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Koefisien Gini pada tahun 2019 masih menggunakan data sementara sama dengan tahun 2018 yaitu sebesar 0,4480.

Capaian tingkat pertumbuhan ekonomi dan Koefisien Gini di Kabupaten Bantul pada tahun 2018, serta upaya pemerintah untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka Koefisien Gini di Kabupaten Bantul tahun 2020 diharapkan bisa diturunkan dengan mendorong empat lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar di Kabupaten Bantul, yaitu industri pengolahan, pertanian, kehutanan, dan perikanan, penyediaan akomodasi dan makan minum, dan konstruksi.

3.1.3.5. Nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Nilai *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output yang diwujudkan dalam PDRB di daerah. ICOR digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dari suatu investasi. Semakin rendah ICOR, semakin tinggi efisiensi investasinya. Sebaliknya, semakin tinggi ICOR, investasi yang dilakukan semakin tidak efisien. Besaran ICOR diperoleh dari perbandingan tambahan kapital dengan tambahan output. Jika koefisien ICOR bernilai negatif atau nilai relatif besar dapat menunjukkan bahwa terjadi *inefficiency* dalam investasi. Untuk menilai tingkat efisiensi suatu investasi juga mempertimbangkan karakteristik perekonomian suatu wilayah apakah bersifat *capital intensive* atau *labor intensive*.

Sebagai gambaran, ICOR DIY pada periode tahun 2016 hingga 2018 berada pada kisaran 4,77-5,61, sedangkan ICOR Kabupaten Bantul antara 4,40-4,71. Nilai ICOR Kabupaten Bantul relatif lebih rendah dibandingkan ICOR DIY. ICOR Kabupaten Bantul memiliki kecenderungan menurun dalam empat tahun terakhir sehingga semakin menegaskan kondisi investasi yang menarik bagi investor. Perkembangan nilai ICOR Kabupaten Bantul dan DIY sebagai berikut:



*) angka proyeksi

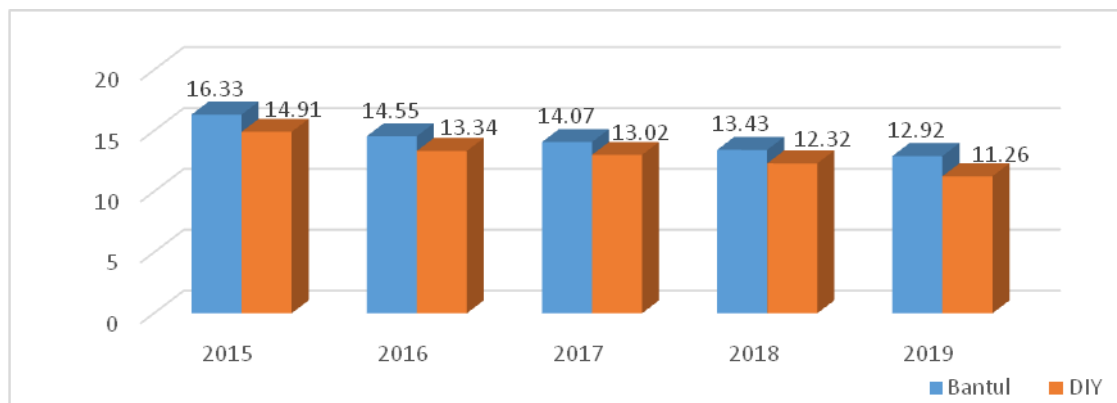
Sumber: BPS, diolah

Gambar 3.6 Perkembangan ICOR Kabupaten Bantul dan DIY Tahun 2016-2019

3.1.3.6. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama pembangunan daerah di Kabupaten Bantul. Meskipun angka kemiskinan terus mengalami pengurangan, angka kemiskinan di Kabupaten Bantul masih diatas angka kemiskinan Provinsi DIY.

Gambaran angka kemiskinan Kabupaten Bantul tahun 2015-2019 dibandingkan dengan Provinsi DIY disajikan pada grafik berikut :



Sumber :BPS dan Bappeda Kabupaten Bantul, 2020

Gambar 3.7 Angka Kemiskinan Kabupaten Bantul dan Provinsi DIY Tahun 2015 - 2019

Dari data yang dihimpun oleh BPS Kabupaten Bantul, angka kemiskinan di Kabupaten Bantul cenderung mengalami penurunan. Jumlah jiwa miskin pada Tahun 2019 diperkirakan sebanyak 122.151 jiwa (12,92 persen) menurun dari tahun 2018 sejumlah 134.835 jiwa (13,43 persen).

Pengentasan kemiskinan memerlukan penanganan yang serius dari semua stakeholder, antara lain melalui program-program pengentasan kemiskinan berupa pemberdayaan masyarakat dan pengurangan beban warga miskin. Pemberdayaan masyarakat miskin meliputi Program Pengembangan Kawasan dengan Basis Kemiskinan Tinggi, Program Pengembangan Produk Andalan Setempat (PAS), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Pengentasan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM). Pengurangan beban warga miskin meliputi Program Fasilitasi RTLH, pemberian Jaminan Kesehatan (Jamkes) kepada warga miskin, dan kegiatan inovatif yaitu pemberian Boga Sehat bagi warga miskin tak berdaya.

Ada tiga kelompok besar upaya yang dilaksanakan dalam menanggulangi kemiskinan pada tahun 2021 yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas : Pemberdayaan (pelatihan, penguatan modal, dan pemasaran).
2. Pengurangan Beban : Infrastruktur dasar, RTLH, jaminan sosial dan jaminan kesehatan, pendidikan dan pangan
3. Validasi Data Kemiskinan

3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021

Perkembangan perekonomian Kabupaten Bantul pada Tahun 2020 tidak dapat dilepaskan dari pandemi covid-19. Pada Tahun 2020 perekonomian Kabupaten Bantul diperkirakan akan mengalami pertumbuhan negatif 0,13 persen. Tantangan dan prospek perekonomian daerah dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2021 adalah mulai pulihnya aktivitas perekonomian seperti UMKM, perdagangan, pariwisata dan kegiatan industri. Kondisi tersebut akan memacu perekonomian daerah, peningkatan lapangan kerja, dan meningkatnya pendapatan daerah.

Kebijakan bidang ekonomi Kabupaten Bantul diarahkan pada percepatan pemulihan ekonomi dengan prioritas peningkatan manajemen pemulihan ekonomi dan sosial serta penguatan infrastruktur dengan memperhatikan protokol kesehatan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021 berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Selain itu berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pendidikan, kesehatan, dan peruntukkan Anggaran Dana Desa ditentukan proporsi jumlah alokasi anggaran dalam APBD Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1. Berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Anggaran untuk Pendidikan sebesar minimal 20% dari APBD.
2. Berdasarkan pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, anggaran untuk kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD.
3. Berdasarkan pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggaran untuk Dana Desa sebesar 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK.

3.2.1 Kapasitas Fiskal Daerah

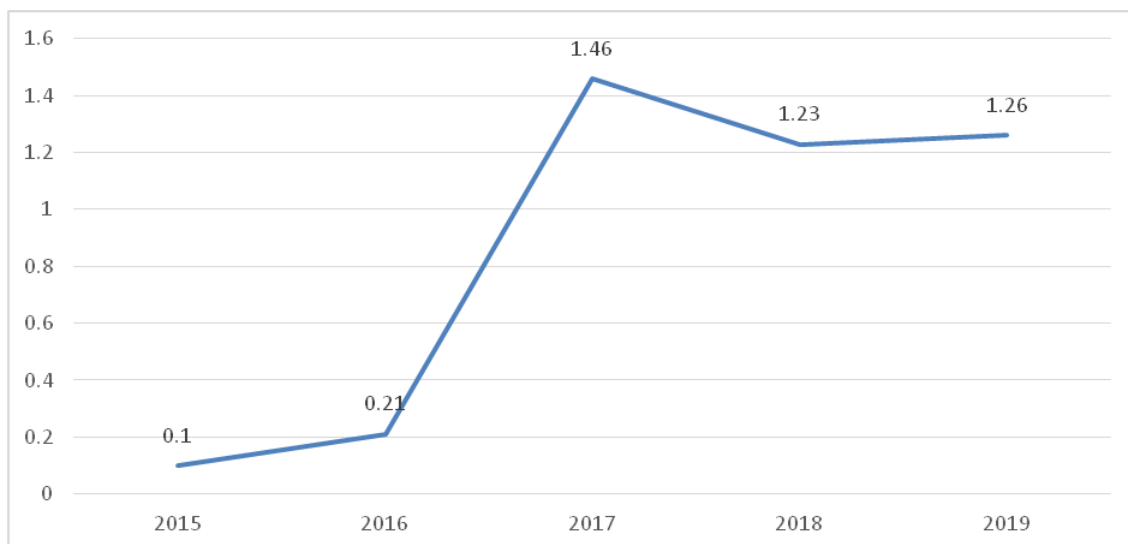
Berdasarkan Peraturan Kementrian Keuangan Nomor 33/PMK.07/2015 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Kapasitas Fiskal merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi dengan belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Sedangkan berdasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran dari kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja pegawai.

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten kota sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Kapasitas Fiskal Daerah dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

1. Daerah dengan indeks Kapasitas Fiskal Daerah lebih dari atau sama dengan 2,05 (dua koma nol lima) ($IKFD \geq 2,05$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah sangat tinggi;

2. Daerah dengan indeks Kapasitas Fiskal Daerah antara lebih dari atau sama dengan 1,14 (satu koma satu empat) sampai kurang dari 2,05 (dua koma nol lima) ($1,14 \geq \text{IKFD} < 2,05$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah tinggi;
3. Daerah dengan indeks Kapasitas Fiskal Daerah antara lebih dari atau sama dengan 0,72 (nol koma tujuh dua) sampai kurang dari 1,14 (satu koma satu empat) ($0,72 \geq \text{IKFD} < 1,14$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah sedang;
4. Daerah dengan indeks Kapasitas Fiskal Daerah antara lebih dari atau sama dengan 0,53 (nol koma lima tiga) sampai kurang dari 0,72 (nol koma tujuh dua) ($0,53 \geq \text{IKFD} < 0,72$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah rendah; dan
5. Daerah dengan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kurang dari 0,53 (nol koma lima tiga) ($\text{IKFD} < 0,53$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah sangat rendah.

Pada tahun 2015, nilai Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) Kabupaten Bantul sebesar 0,10 atau masuk dalam kategori rendah, pada tahun 2016 nilai IKF mengalami peningkatan namun masih masuk dalam kategori rendah yakni sebesar 0,21. Pada tahun 2017 sampai tahun 2019, nilai IKF Kabupaten Bantul mengalami peningkatan status ke dalam daerah dengan kategori IKF tinggi mencapai 1,46 pada tahun 2017. Namun menurun menjadi 1,23 pada tahun 2018, dan mengalami kenaikan menjadi 1,26 pada tahun 2019.



Sumber Data : Peraturan Menteri Keuangan tentang Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2015-2019

Gambar 3.8 Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

3.2.2 Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

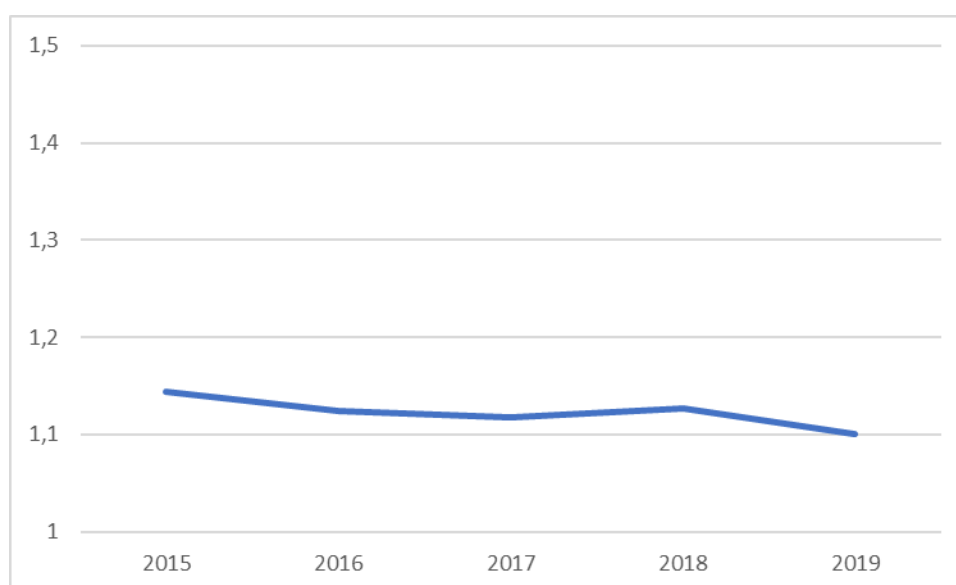
Kemampuan keuangan daerah tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula.

Secara umum kondisi kemampuan mendanai Belanja Daerah Kabupaten Bantul mengalami penurunan selama periode tahun 2015-2017. Pada tahun 2015 sebesar 1,14 dan pada tahun 2016 sebesar 1,12 kemudian pada tahun 2017 sebesar 1,18. Berkaitan dengan kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk mencari sumber pembiayaan lain termasuk opsi kerjasama pemerintah dan badan usaha/swasta yang harus mulai dirintis serta diwujudkan untuk meningkatkan daya saing, mengatasi permasalahan dan menyikapi tantangan kedepan.

Tabel 3.5 Perhitungan Kemampuan Mendanai Belanja Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

Tahun	TOTAL PENDAPATAN	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	TOTAL PENERIMAAN	TOTAL BELANJA	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	TOTAL PENGELUARAN	KEMAMPUAN MENDANAI BELANJA DAERAH
1	2	3	4=(2+3)	5	6	7=(5+6)	8=(4:7)
2015	1.951.223	298.602	2.249.825	1.933.302	33.497	1.966.799	1,144
2016	2.000.334	293.078	2.293.413	2.016.544	24.752	2.041.296	1,124
2017	2.086.879	261.454	2.348.333	2.076.742	24.365	2.101.107	1,118
2018	2.227.752	256.630	2.484.383	2.165.652	39.573	2.205.224	1,127
2019	2.269.539	296.985	2.566.524	2.283.585	48.892	2.332.477	1,100

Sumber: BKAD, diolah 2020



Sumber: BKAD, diolah 2020

Gambar 3.9 Perkembangan Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2015 – 2019

3.2.3 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pendapatan daerah dikelompokkan atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD meliputi Pendapatan pajak

daerah, Pendapatan retribusi daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang sah terdiri atas dana hibah, dana darurat, bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus.

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya dan pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, untuk itu maka dapat dirumuskan arah kebijakan Pendapatan daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 meliputi :

1. Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak. Sedangkan DAU sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa untuk Pagu DAU pada perubahan akan menyesuaikan dengan pendapatan Negara maka diasumsikan sama dengan tahun lalu, karena pandemi covid-19 dan kebijakan Pusat untuk melakukan refocusing yang menyebabkan DAU mengalami penurunan, sehingga pagu DAU diasumsikan sama dengan pasca refocusing tahun 2020. Untuk pagu DAK tidak diperhitungkan.
2. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;
3. Proyeksi pendapatan diasumsikan naik sebesar 2% dari tahun 2020, yang bersumber dari proyeksi kenaikan komponen PAD, yaitu pajak daerah, khususnya PBB sebagai penyumbang terbesar;
4. Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan mutu pelayanan publik kepada wajib pajak/retribusi daerah dengan memberikan kecepatan/kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak, akses informasi dan kemudahan dalam pengurusan pajak.
 - b. Memperbaiki dan memperluas basis data objek dan subjek pajak/retribusi daerah.
 - c. Memberikan reward dalam bentuk undian bagi wajib pajak di setiap kecamatan yang lunas sebelum jatuh tempo.
 - d. Memberikan reward bagi pamong desa dan dukuh yang telah lunas sebelum jatuh tempo.
 - e. Mengembangkan pelaporan pajak secara online untuk wajib pajak yang melakukan sistem pemungutan secara self assessment.
2. Melakukan sinergi dengan pemerintah desa dalam rangka pemungutan pajak daerah melalui Layanan Mobil Keliling Pajak;
 3. Pendayagunaan Aset Daerah;
 4. Peningkatan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD melalui upaya memperkuat permodalan perusahaan milik daerah/BUMD;
 5. Optimalisasi penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak melalui kerjasama instansi vertikal dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait;
 6. Kebijakan relaksasi terhadap beberapa obyek pajak pada tahun 2020 dihentikan.
 7. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah misal dengan memperbaiki fasilitas obyek retribusi.

Adapun hasil analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2016 s.d 2019, Target Anggaran Pendapatan Tahun 2020, dan Prediksi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2021

NO	U R A I A N	REALISASI				APBD TAHUN 2020	PREDIKSI TAHUN 2021
		TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PENDAPATAN	2.000.334.166.353,84	2.086.864.734.570,45	2.227.752.027.348,97	2.269.539.168.277,63	2.313.851.073.116,50	1.770.331.701.424,62
I	Pendapatan Asli Daerah	404.454.703.746,07	494.164.813.471,97	462.653.956.229,75	505.929.472.001,63	469.798.331.294,00	480.767.307.797,00
1	Pajak Daerah	133.474.742.165,22	165.548.104.004,37	182.127.309.683,88	213.628.741.844,18	195.000.000.000,00	221.912.299.401,00
2	Retribusi Daerah	26.613.085.433,67	31.575.738.483,00	46.052.620.246,00	48.278.231.843,00	46.832.583.434,00	39.121.683.104,00
3	Hasil Pengel. Kekayaan Daerah yang dipisahkan	21.068.269.986,18	20.130.437.131,20	19.652.871.723,03	21.945.038.058,10	23.707.166.955,00	23.707.166.955,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	223.298.606.161,00	276.910.533.853,40	214.821.154.576,84	222.077.460.256,35	204.258.580.905,00	196.026.158.337,00
II	Dana Perimbangan	1.331.352.777.163,00	1.287.256.262.558,00	1.355.455.930.302,00	1.342.552.919.731,00	1.393.629.940.890,50	960.630.072.890,50
	Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	39.338.415.888,00	34.871.178.970,00	30.584.172.190,00	17.867.395.449,00	28.634.067.890,50	28.634.067.890,50
	Dana Alokasi Umum	999.814.365.000,00	982.250.842.000,00	982.250.842.000,00	1.009.528.274.000,00	1.025.870.924.000,00	931.996.005.000,00
	Dana Alokasi Khusus	292.199.996.275,00	270.134.241.588,00	342.620.916.112,00	315.157.250.282,00	339.124.949.000,00	0

NO	URAIAN	REALISASI				APBD TAHUN 2020	PREDIKSI TAHUN 2021
		TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	264.526.685.444,77	305.443.658.540,48	409.642.140.817,22	412.452.595.445,00	450.422.800.932,00	328.934.320.737,12
	Pendapatan Hibah	6.148.735.500,00	10.598.764.728,00	139.341.833.553,00	77.281.170.982,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00
	Bagi Hasil Pajak dari Propinsi atau Pemda lainnya	137.137.204.944,77	145.068.714.991,48	155.587.029.264,22	164.965.839.463,00	167.733.524.432,00	141.464.899.237,12
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	99.912.945.000,00	131.691.087.000,00	113.326.105.000,00	165.849.585.000,00	192.493.982.000,00	106.215.995.000,00
	Bantuan Keuangan dr Prop /Pemda Lainnya	21.327.800.000,00	18.085.091.821,00	1.387.173.000,00	4.356.000.000,00	85.695.294.500,00	76.753.426.500,00

Sumber : BKAD Kabupaten Bantul, 2020

3.2.4 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perencanaan belanja daerah dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, sehingga belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu, kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan;
2. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan belanja pegawai ASN dan pemberian gaji ke-13 serta tunjangan hari raya dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji dan tunjangannya (*acress* maksimal 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangannya), kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, TPP, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, jaminan kesehatan, dan jaminan kecelakaan dan kematian.
3. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Belanja langsung pada setiap PD untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
5. Belanja Bantuan Keuangan diarahkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, antara lain ditujukan untuk menurunkan

angka kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta meningkatkan infrastruktur perdesaan dan fasilitas umum.

6. Efisiensi Belanja Tidak Langsung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik sebagai salah satu wujud reformasi birokrasi, dan mengefisienkan belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
7. Belanja yang bersumber dari dana perimbangan disesuaikan dengan peruntukannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Prioritas penggunaan dana perimbangan adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak; penggunaan DBH pajak bersifat *block grant* yang penggunaannya diserahkan daerah sesuai kebutuhan daerah masing-masing kecuali untuk DBH CHT paling sedikit 50% digunakan untuk mendanai program/kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai serta pemberantasan barang kena cukai ilegal serta jaminan kesehatan.
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU); untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK); untuk memenuhi penyediaan infrastruktur layanan publik dan mendukung operasional penyelenggaraan layanan publik, yaitu sarana/prasarana dasar yang menjadi urusan daerah (antara lain jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain) sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan. Pada RKPD, asumsi belanja bersumber DAK tidak diperhitungkan.
8. Belanja yang bersumber dari dana penyesuaian otonomi khusus disesuaikan peruntukannya sesuai peraturan yang berlaku:
 - a. Dana Insentif Daerah (DID); digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang mendukung pencapaian kinerja atas kategori DID sesuai dengan jumlah alokasi yang diterima. Pada RKPD, asumsi belanja bersumber DID tidak diperhitungkan.

- b. Dana Desa; digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun realisasi dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2016 s.d 2019, Target Anggaran Belanja Tahun 2020, dan Prediksi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi				APBD	Prediksi
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
B	Belanja Daerah	2.016.543.978.974,11	2.076.742.163.062,60	2.165.651.760.352,96	2.283.585.037.902,49	2.474.907.091.918,14	1.845.688.465.496,00
I	Belanja Tidak Langsung	1.265.890.290.230,00	1.132.578.116.160,00	1.142.422.666.947,96	1.180.250.623.744,00	1.334.474.653.321,04	1.067.071.323.291,00
1	Belanja Pegawai	1.032.505.302.997,00	825.306.291.768,00	826.969.448.856,00	838.871.806.847,00	917.865.137.233,00	756.699.605.912,00
2	Belanja Bunga				39.333.333,00		
3	Belanja Hibah	31.862.069.500,00	66.409.792.624,00	44.796.019.984,96	59.645.560.800,00	90.916.212.000,00	29.520.000.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial	3.267.350.000,00	1.650.300.000,00	7.852.092.250,00	6.920.020.000,00	6.810.000.000,00	2.193.000.000,00
5	Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Prop/Kab/Kota dan Desa	12.429.995.580,00	14.330.194.685,00	17.798.976.196,00	22.290.550.000,00	22.871.517.593,40	26.103.398.250,00
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Prop/Kab/Kota dan Desa	185.304.699.853,00	222.760.211.526,00	244.600.587.161,00	251.170.936.014,00	280.110.271.960,00	237.555.319.129,00
7	Belanja Tidak Terduga	520.872.300,00	2.121.325.557,00	405.542.500,00	1.312.416.750,00	15.901.514.534,64	15.000.000.000,00
II	Belanja Langsung	750.653.688.744,11	944.164.046.902,60	1.023.229.093.405,00	1.103.334.414.158,49	1.140.432.438.597,10	778.617.142.205,00
1	Belanja Pegawai	44.678.753.435,00	69.976.098.898,00	93.830.065.697,00	113.645.098.184,00	121.493.996.828,00	110.354.307.900,00
2	Belanja Barang dan Jasa	421.914.402.647,16	541.568.682.551,46	591.238.914.803,47	652.974.844.349,88	625.601.960.111,10	467.097.741.040,00
3	Belanja modal	284.060.532.661,95	332.619.265.453,14	338.160.112.904,53	336.714.471.624,61	393.336.481.658,00	201.165.093.265,00

Sumber : BKAD Kabupaten Bantul, 2020

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah diuraikan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Prediksi Belanja tahun 2021 tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.8 Prediksi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2021 sesuai PP No.12 Tahun 2019

Prediksi Tahun 2021		
Belanja Daerah		1.845.688.465.496,49
I	Belanja Operasi	
1	Belanja Pegawai	867.053.913.812,00
2	Belanja Barang dan Jasa	467.097.741.040,00
3	Belanja Bunga	0
4	Belanja Subsidi	0
5	Belanja Hibah	29.520.000.000,00
6	Belanja Bantuan Sosial	2.193.000.000,00
II	Belanja modal	201.165.093.265,00
III	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00
IV	Belanja Transfer	263.658.717.379,00
	Belanja bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan	263.658.717.379,00

Sumber : Bappeda, diolah 2020

3.2.5 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun Anggaran 2019, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021 diarahkan sebagai berikut:

1. Proyeksi pembiayaan daerah Tahun 2021 diasumsikan turun dari Tahun 2020 dikarenakan adanya penurunan SiLPA;

2. Proyeksi Penyertaan Modal Daerah dialokasikan sebesar Rp23.500.000.000,00 yang terdiri dari:
 - Bank BPD Rp17.000.000.000,00
 - Bank Bantul Rp2.000.000.000,00
 - PDAM Rp4.500.000.000,00.
3. Kebijakan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah yang telah ditetapkan dalam Perda dengan prinsip kehati-hatian;
4. Penguatan pengelolaan dana bergulir; dan
5. Menjaga agar keuangan daerah dan apabila terdapat defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu.

Tabel 3.9 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016 s.d 2019, Target Tahun 2020, dan Prediksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi				APBD Tahun 2020	Prediksi Tahun 2021
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
C	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	293.078.441.725,81	261.454.280.812,54	256.630.482.020,39	296.985.005.918,40	176.556.833.064,26	109.856.764.028,69
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	283.026.051.157,81	254.841.678.796,54	247.144.690.990,39	279.158.249.016,40	165.556.833.064,26	98.856.764.028,69
2	Penerimaan Piutang Daerah / Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	8.710.516.768,00	6.612.602.016,00	9.485.791.030,00	14.853.006.902,00	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00
3	Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan	1.341.873.800,00	-	-	2.973.750.000,00	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	24.752.000.000,00	24.364.800.000,00	39.572.500.000,00	48.891.500.000,00	15.500.814.262,62	34.500.000.000,00
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.045.000.000,00	17.150.000.000,00	31.500.000.000,00	34.300.000.000,00	4.500.814.262,62	23.500.000.000,00
2	Pembayaran Utang Pokok	-	-	-	7.000.000.000,00	-	-
3	Dana Bergulir	8.707.000.000,00	7.214.800.000,00	8.072.500.000,00	7.591.500.000,00	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	268.326.441.725,81	237.089.480.812,54	217.057.982.020,39	248.093.505.918,40	161.056.018.801,64	75.356.764.028,69
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	252.116.629.105,54	247.212.052.320,39	279.158.249.016,40	234.047.636.293,54	0,00	0,00

Sumber : BKAD Kabupaten Bantul, 2020